BAB V

OUTPUT PENELITIAN

STRATEGI PENANGGULANGAN KELEBIHAN KAPASITAS DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA

A. Ringkasan Eksekutif

Permasalahan kelebihan kapasitas menjadi tantangan utama di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa karena jumlah warga binaan melebihi daya tampung sehingga memengaruhi pembinaan, pelayanan, pengamanan, dan pemenuhan hak warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penanggulangan kelebihan kapasitas menggunakan teori strategi Koteen dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen terhadap sembilan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lapas telah menerapkan strategi organisasi, program, pendukung sumber daya, dan kelembagaan melalui pembinaan, optimalisasi pemberian hak integrasi berupa remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat, penerapan SOP, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena terkendala keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta proses administratif yang masih panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi pemberian hak integrasi sesuai ketentuan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas agar penanggulangan kelebihan kapasitas lebih efektif dan tujuan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

B. Pendahuluan

Kelebihan kapasitas pada lapas merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh berbagai UPT pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah warga binaan melebihi daya tampung yang tersedia

sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan, pembinaan, pengamanan, serta pemenuhan hak-hak WBP. Permasalahan ini juga menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pembinaan berbasis reintegrasi sosial.

Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa merupakan salah satu lapas yang mengalami kelebihan kapasitas. Sebagai lapas khusus perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan, lembaga ini menerima narapidana perempuan dari berbagai kabupaten/kota sehingga jumlah penghuni terus meningkat. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan kesehatan, pengamanan, serta pelaksanaan program-program pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa telah melaksanakan berbagai strategi untuk mengatasi kelebihan kapasitas melalui pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian, pemberian hak integrasi, serta penerapan SOP yang mengacu pada kebijakan Ditjenpas. Namun demikian, pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, serta proses administrasi yang belum sepenuhnya efisien.

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian tersebut, diperlukan penyusunan *policy brief* yang memuat gambaran singkat mengenai permasalahan, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa maupun pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan strategi penanggulangan kelebihan kapasitas secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

C. Deskripsi Masalah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelebihan kapasitas di lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Proses administrasi pemberian hak integrasi (remisi, asimilasi, CB, dan PB) yang masih membutuhkan koordinasi lintas instansi sehingga memperlambat pengurangan jumlah WBP.
2. Keterbatasan SDM, khususnya petugas pengamanan dan pembinaan yang harus melayani jumlah WBP yang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas ideal.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana, baik ruang hunian maupun fasilitas pendukung pembinaan.
4. Ketidaksempurnaan SOP penerimaan WBP.

Dampak dari kondisi tersebut meliputi meningkatnya beban kerja petugas, berkurangnya efektivitas program pembinaan, keterbatasan ruang gerak WBP, meningkatnya risiko gangguan keamanan, serta berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik di bidang pemasyarakatan.

D. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi sistem informasi semua instansi yang terkait.

   Dibutuhkan digitalisasi sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh instansi agar dokumen administratif WBP dapat diperbarui secara *real time.* Rekomendasi ini juga mencerminkan transparansi koordinasi antarinstansi. Sehingga hal ini dapat memperlancar pemberian hak integrasi guna mengurangi kelebihan kapasitas di lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa.

2. Penguatan SDM dan sarana prasarana

   Mengusulkan penambahan petugas pemasyarakatan kepada Kanwil yang disertai dengan pelatihan dalam peningkatan kualitas SDM. Hal ini juga dilakukan agar tercapainya rasio ideal antara petugas dan WBP. Dibutuhkan pula rehabilitasi fasilitas yang bertujuan agar pembinaan dan pelayanan lebih optimal. Rekomendasi ini berfokus pada:

   a. Penambahan petugas pengamanan
   b. Penambahan petugas registrasi
   c. Penambahan ruang hunian
   d. Perluasan ruang kegiatan kerja

3. Menyempurnakan SOP penerimaan WBP.

   Setiap narapidana yang diterima harus disertai dokumen administrasi yang lengkap melalui penggunaan daftar periksa. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, perlu ditetapkan batas waktu penyelesaian dan mekanisme koordinasi dengan kejaksaan maupun kepolisian agar tidak menghambat proses pembinaan dan pengusulan hak integrasi.